

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 213/PMK.01/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGANNOMOR 508/KMK.01/1999 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
KERUGIANNEGARA BUKAN KEKURANGAN
PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
KEUANGAN

FORM-7

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

	Saya yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nai	ma :	
NIP		
	ngkat :	
	oatan :	
лιа	·	
	ngan ini menerangkan bahwa:	
1.	Saya bertanggungjawab atas kerugian negara sebes yakni kerugian negara yang disebabkan	
2.	Kerugian negara tersebut di atas akan saya ganti dengan ketentuan sebagai berikut:	pembayaran secara bertahap, dengan
	a. Jangka waktu pembayaran selama bulan (maksima;	l 24 bulan), mulai bulan s.d. bulan
	b. Pembayaran dilaksanakan pada tanggal setiap bular	1;
	c. Pembayaran dilaksanakan dengan menyetorkan uang Nomor	sebesar Rp ke rekening kas negara
	d	
3.	Sebagai jaminan atas surat keterangan ini, saya serahkan jaminan berupa:	
	a	
	b	
	Apabila setelah saya menandatangani surat keterangan ini ternyata saya tidak melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam angka 2 di atas, maka negara dapat menjual dan/atau mencairkan jaminan tersebut pada angka 3 dan/atau dapat meningkatkan status penagihan ke Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi (SKPGR).	
	Keterangan di atas tidak menutup kemungkinan b mbali dalam hal uang yang telah Saya setorkan lebih da pada saya.	
		20
		Materai
		()
	nyetujui pala Kantor/ Satuan Kerja	
()	
Sak	ksi – saksi:	
1		
2		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

RETARIAT JENDER

GIARTO NIP 195904201984021001



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213/PMK.01/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGANNOMOR 508/KMK.01/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN

KEUANGANNOMOR 508/KMK.01/1999 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
KERUGIANNEGARA BUKAN KEKURANGAN
PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
KEUANGAN

LAMPIRAN II

FORM 24

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

PENETAPAN NILAI KERUGIAN NEGARA

I BIABIMI MI MBAI KBROGIMI WBAMAY		
Berdasarkan referensi/informasi dari*) tanggal diketahu bahwa besaran nilai kerugian negara berupa**) sebesar Rp***) (dengan huruf).		
Sehubungan dengan hal tersebut, kami tetapkan nilai kerugian negara yang terjadi pada Satuan Kerja sebesarRp ***)(dengan huruf)		
Demikian penetapan nilai kerugian negara ini diterbitkan untuk dapat digunakan dalam proses penyelesaian kerugian negara.		
Kepala Kantor/Satuan Kerja		
Tanda Tangan		
() NIP		
*) Sebutkan sumber informasinya dengan jelas. **) Jelaskan uraian objek kerugian negara dengan jelas. ***) Disesuaikan dengan mata uang.		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

u.b. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

PETABLAT JEN

GIARTO NIP 195904201984021001